



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)  
**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MICHAEL ANDREAS PURWOADI
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 101177

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 17.826.229.200

1. Tanah dan Bangunan Seluas 245 m<sup>2</sup>/150 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 10.707.752.200
2. Tanah Seluas 239 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 918.477.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m<sup>2</sup>/150 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m<sup>2</sup>/30 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m<sup>2</sup>/140 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 285.000.000

1. MOBIL, CHEVROLET CAPTIVA FL DIESEL Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOBIL, VW TIGUAN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. LAINNYA, SEPEDA BROMPTON Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 325.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. 4.410.943.654



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.826.633.817
F. HARTA LAINNYA	Rp.	66.454.685
Sub Total	Rp.	25.740.261.356
III. HUTANG	Rp.	143.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	25.597.261.356

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpni.kpk.go.id](http://elhkpni.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpni.kpk.go.id](http://elhkpni.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.